



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

- Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan:
1. Deputi Bidang Usaha Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN RI;
2. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI (diwakili Asdep);
3. Para Direktur Utama: PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), Perum Damri, PT Pelindo I s.d. IV (Persero), PT Angkasa Pura I dan II (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Sifat Rapat : Terbuka
Rapat ke : 2 (dua)
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Mei 2018
W a k t u : Pukul 10.30 s.d 15.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat : H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG), didampingi oleh:
1. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F.Gerindra);
2. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD);
3. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F.Hanura).
- Sekretaris Rapat : Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a : Membahas kesiapan menghadapi mudik Hari Raya Idul Fitri 1439 H.
Hadir : 31 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI.
1. Deputi Bidang Usaha Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN RI beserta jajaran;
2. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI (diwakili Asdep) beserta jajaran;
3. Para Direktur Utama: PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), Perum Damri, PT Pelindo I s.d. IV (Persero), PT Angkasa Pura I dan II (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. RDP Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan; Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI (diwakili Asdep); dan Para Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), Perum Damri, PT Pelindo I s.d. IV (Persero), PT Angkasa Pura I dan II (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dibuka pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP pada hari ini membahas kesiapan menghadapi mudik Hari Raya Idul Fitri 1439 H.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Deputi Bidang Usaha Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan; Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI (diwakili Asdep); dan Para Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), Perum Damri, PT Pelindo I s.d. IV (Persero), PT Angkasa Pura I dan II (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk menjelaskan mengenai kesiapan menghadapi mudik Hari Raya Idul Fitri 1439 H.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Deputi Bidang Usaha Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan; Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI (diwakili Asdep); dan Para Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), Perum Damri, PT Pelindo I s.d. IV (Persero), PT Angkasa Pura I dan II (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk melakukan optimalisasi dalam pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap BUMN penyelenggara/pengelola transportasi dalam memberikan pelayanan mudik lebaran 1439 H yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, lancar dengan harga yang wajar dan terjangkau sebagaimana peraturan perundang-undangan.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk menerapkan *reward and punishment* terhadap Direksi BUMN yang berhasil atau gagal dalam memberikan pelayanan mudik lebaran 1439 H.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada BUMN agar sumber pembiayaan Program Mudik Bareng BUMN 2018 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi VI DPR RI akan melaksanakan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan penyelenggaraan BUMN di sektor transportasi dalam memberikan pelayanan mudik lebaran 1439 H.

Catatan:

- Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk memberikan laporan penyelenggaraan BUMN dalam memberikan pelayanan mudik lebaran 1439 H sebagai materi pembahasan dan evaluasi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI yang akan dijadwalkan setelah mudik lebaran 1439 H.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.45 WIB.